TRANSPARANSI PUBLIK DALAM PENANGANAN BENCANA PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH DESA DERMAJI, BANYUMAS, JAWA TENGAH

Diar Budi Utama[1], Nrangwesthi Widyaningrum[2]

1. Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Email: diarbudiutama1@gmail.com
2. Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Email: wnrangwesthi@gmail.com

Abstract

Public straightforwardness is an essential issue in the execution of public strategies, where the type of public responsibility lies in the open admittance to data in strategy execution. Public issues that are regularly confronted are calamity the executives. So a speedy reaction from partners is required as a joint commitment exertion, one of which is the significant job of the Village Government. In dealing with the COVID-19 pandemic, the Dermaji Village Government effectively tries to give data administrations in regards to the speed increase of taking care of the COVID-19 pandemic by using electronic media. The motivation behind this paper is to portray the significance of public straightforwardness in dealing with the COVID-19 pandemic in the town government as an essential exertion by the public authority in giving simple admittance to data in each movement did. The exploration technique utilized in this examination is subjective exploration with a writing concentrate on approach. The investigation in this paper utilizes a public straightforwardness hypothesis come closer from Koppell (2005) which incorporates simple entry and media data. The outcomes show that the execution of public straightforwardness in speeding up the treatment of the COVID-19 pandemic in Dermaji Village has been running great from the part of simple entry to data and the data media utilized, however it is important to expand the limit of town authorities as directors of advanced town data innovation, as well as reinforcing the web network so it tends to be reached. by the entire local area in Dermaji Village.

Keywords: COVID-19, Dermaji Village, Public Policy, Public Transparency

Abstrak

Transparansi publik merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kebijakan publik, dimana wujud akuntabilitas publik terletak pada terbukanya akses informasi dalam implementasi kebijakan. Isu-isu publik yang sering dihadapi adalah upaya-upaya malapetaka yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Dengan tujuan diperlukan mentalitas reaksi cepat dari mitra kerja sebagai komitmen bersama yang salah satunya adalah tugas penting Pemerintah Desa. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah Desa Dermaji secara efektif berupaya memberikan administrasi

data terkait peningkatan kecepatan penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan media elektronik. Tulisan ini dibuat untuk menggambarkan upaya esensial pemerintah Desa Dermaji dalam memberikan keterbukaan dan kemudahan akses publik terhadap data penanganan pandemi Covid-19. Strategi pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan subyektif dengan pendekatan penulisan yang berkonsentrasi (studi tulisan). Analisa dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan teori tranparansi publik dari Koppell (2005) yang meliputi kemudahan akses dan media informasi. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan transparansi publik dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Dermaji sudah berjalan baik dari aspek kemudahan akses informasi maupun media informasi yang digunakan, namun perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai pengelola teknologi digital informasi desa, serta penguatan jaringan internet supaya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di Desa Dermaji.

Kata Kunci: COVID-19, Desa Dermaji, Kebijakan Publik, Transparasi Publik

I. PENDAHULUAN

Isu strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik yakni terwujudnya transparansi dari pemerintah. Disadari bahwa penilaian publik pada kinerja pemerintah terletak pada tersedianya akses informasi yang mudah dan akurat. Keterusterangan adalah peluang masuknya data yang seharusnya diketahui oleh orang pada umumnya atau individu yang berpotensi berinvestasi (Coryanata, 2012). Data yang terkait dengan pelaksanaan strategi publik harus terbuka, sederhana, dan tersedia untuk semua pihak yang membutuhkannya, dan memberi cukup, dan lugas (Rohman, 2016). Masalah publik yang sering dihadapi negara ini yakni upaya penanggulangan bencana. Dimana malapetaka adalah keadaan kejadian yang melampaui kapasitas manusia yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda. Sehingga diperlukan mentalitas reaksi cepat dari mitra kerja sebagai komitmen bersama, salah satunya adalah tugas signifikan dari otoritas publik. Kegagalan pendekatan pandangan dunia eksekutif tampaknya membatasi bahaya yang muncul karena efek bencana. Dengan cara ini, penurunan bahaya bencana diperlukan sebagai cara metodis untuk menangani membedakan, mengevaluasi dan mengurangi bahaya kegagalan. Ini adalah kewajiban negara dan kantor bantuan dan itu harus menjadi kebutuhan hampir semua asosiasi ini (Twigg, 2009).

Tercapainya bencana yang memaksa strategi eksekutif sangat mempengaruhi daerah, secara keseluruhan kegiatan atau aktivitas masyarakat yang merupakan individu dari daerah tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh otoritas publik atau negara (Islamy, 2016). . Selanjutnya, otoritas publik perlu menjamin bahwa eksekusi strategi yang layak dilakukan melalui rencana program yang memuaskan dan pengorganisasian interaksi eksekusi (Pülzl & Treib, 2007). Guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan manajemen bencana, langkah strategis yang ditempuh dalam mewujudkan

salah satu standar administrasi yang baik yakni terselenggaranya transparansi. Keterusterangan adalah instrumen penting untuk mengevaluasi eksekusi hierarkis agar terbuka dalam menyampaikan data sehingga mengharuskan administrator untuk menyetujui pedoman (Koppell, 2005).

Akhir-akhir ini telah terjadi kegagalan karena Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh kontaminasi Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (WHO, 2020). Penyakit ini dapat ditularkan mulai dari satu manusia kemudian ke manusia berikutnya dan telah menyebar secara umum di Cina dan lebih dari 190 negara dan distrik yang berbeda (WHO, 2020). Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi (WHO, 2020). Hingga 29 Maret 2020, ada 634.835 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, 1.528 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 136 orang meninggal. Keadaan darurat standar kerangka dewan tampaknya telah kehilangan signifikansinya dan membatasi legislatif di berbagai negara untuk mengambil pendekatan yang umumnya akan menjadi eksperimen (Winanti dan Mas'udi, 2020).

Upaya penanganan pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Strategi administrasi koperasi adalah jenis struktur pemerintahan, di mana setidaknya satu organisasi publik secara langsung terhubung dengan mitra non-negara dalam interaksi dinamis konvensional, kesepakatan terletak, deliberatif, dan mendorong perincian atau pelaksanaan pengaturan publik, atau dapat juga muncul sebagai memprogram dewan atau sumber daya publik (Rahayu, 2019). Tata kelola kolaboratif ini akan berjalan dengan baik jika dapat mampu didukung dengan transparansi publik yang mampu mewadahi informasi perkembangan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Keterusterangan menyiratkan transparansi otoritas publik dalam memberikan data yang terkait dengan aset publik yang dimiliki eksekutif kepada pihak-pihak yang membutuhkan data (Mardiasmo, 2018).

Di tingkat kota, pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diandalkan untuk melakukan praktik-praktik yang berhubungan dengan penerimaan. Di sini kadang-kadang ada pertunjukan administrasi publik yang lesu sampai saat ini, antara lain karena tidak adanya keterusterangan dalam pelaksanaan administrasi publik. Dengan demikian, administrasi publik harus diselesaikan secara langsung oleh masing-masing unit bantuan organisasi pemerintah dengan alasan bahwa sifat pameran administrasi bantuan publik memiliki konsekuensi yang luas dalam pelaksanaan bantuan pemerintah publik. Dengan keterbukaan dan keterbukaan data, penyalahgunaan kekuasaan dan kekuasaan oleh otoritas publik dapat dicegah, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, lugas dan bertanggung jawab (Kristiyanto, 2016).

Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan salah satu kota yang menjadi fokus penanganan pandemi Covid-19. Upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Desa Dermaji yakni mampu memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk memberikan akses dalam

memberikan informasi pada publik dari kegiatan yang dilakukan selama ini. Berbagai prestasi yang diraih Pemerintah Desa Dermaji dalam penyelenggaraan pemerintahannya terbukti dapat mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada termasuk dari aspek teknologi informasi. Desa Dermaji menang di depan sisa lomba dalam klasifikasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan (PPD) Desa. Pada tahun 2016, Desa Dermaji mendapat kehormatan sebagai pre-famous town of decision untuk klasifikasi Desa Literasi Teknologi Informasi (IT Literacy Village). Tahun 2018 Desa Dermaji mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Desa dengan Website Informatif. Banyaknya prestasi yang telah dicapai Desa Dermaji menunjukkan adanya siklus kemajuan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Desa Dermaji sejauh administrasi terbuka dan pemanfaatan inovasi data dan surat menyurat dan Desa Dermaji memang layak dinobatkan sebagai kota terkomputerisasi (Rokhman, Ali & Bahtaruddin, 2019).

Pada kondisi saat ini, tantangan pemerintah desa dihadapkan pada ketersediaan informasi yang dapat memberikan akses seluas mungkin untuk publik guna memperoleh perkembangan penanganan pandemi Covid-19. Disaat krisis, terkadang pemerintah belum mampu menyediakan wadah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan maupun kondisi saat percepatan penanganan pandemi Covid-19 sampai ke tingkat desa. Lain halnya dengan Pemerintah Desa Dermaji justru muncul dengan kemajuannya dalam memanfaatkan media teknologi informasi sebagai sarana komunikasi publik dalam memberikan akses seluas mungkin untuk melihat perkembangan penanganan pandemi Covid-19 sebagai wujud transparansi publik oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian literatur ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya strategis pada pemerintah Desa Dermaji dalam menyediakan transparansi publik dan kemudahan akses informasi pada penanganan pandemi Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Sistem investigasi yang digunakan dalam tes ini adalah tes abstrak dengan pendekatan penyusunan yang terkonsentrasi (composing review). Komposisi yang digunakan berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat dalam memberikan keterbukaan informasi. Data yang digunakan adalah data diskresioner yang didukung oleh investigasi yang sama. Pengujian diselesaikan dengan merencanakan perspektif dari berbagai penemuan observasional yang ditentukan untuk membuat tindakan ini lebih membumi sebagai hasil dari bantuan dari berbagai perspektif, khususnya dengan menggambarkan pengujian masa lalu untuk mendapatkan garis besar dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai target penelitian dan untuk menunjukkan pertanyaan eksplorasi atau hipotesis yang terbentuk. (Snyder, 2019: 334-335).

Penyusunan sebuah penelitian dapat berupa garis besar langsung dari sumbernya, namun memiliki model yang sah dan memantapkan diagram dan solidaritas. Dalam

teknik survei menulis, para ilmuwan diharapkan memiliki kemampuan yang berbeda, seperti membuat definisi subjek untuk penyelidikan, mendapatkan tulisan yang sesuai, memecah, dan memadukan informasi yang direkam dalam bentuk hard copy (Ramdhani et al., 2014). Kajian literature review diharapkan mampu memecahkan masalah transparansi publik dalam penanganan bencana pendemi Covid-19 khususnya pada tingkat Pemerintah Desa.

Analisa dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan teori tranparansi publik dari Koppell (2005) yang meliputi kemudahan akses dan media informasi. Untuk menggambarkan upaya transparansi dari Pemerintah Desa Dermaji dalam menyediakan informasi terkait bencana Covid-19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

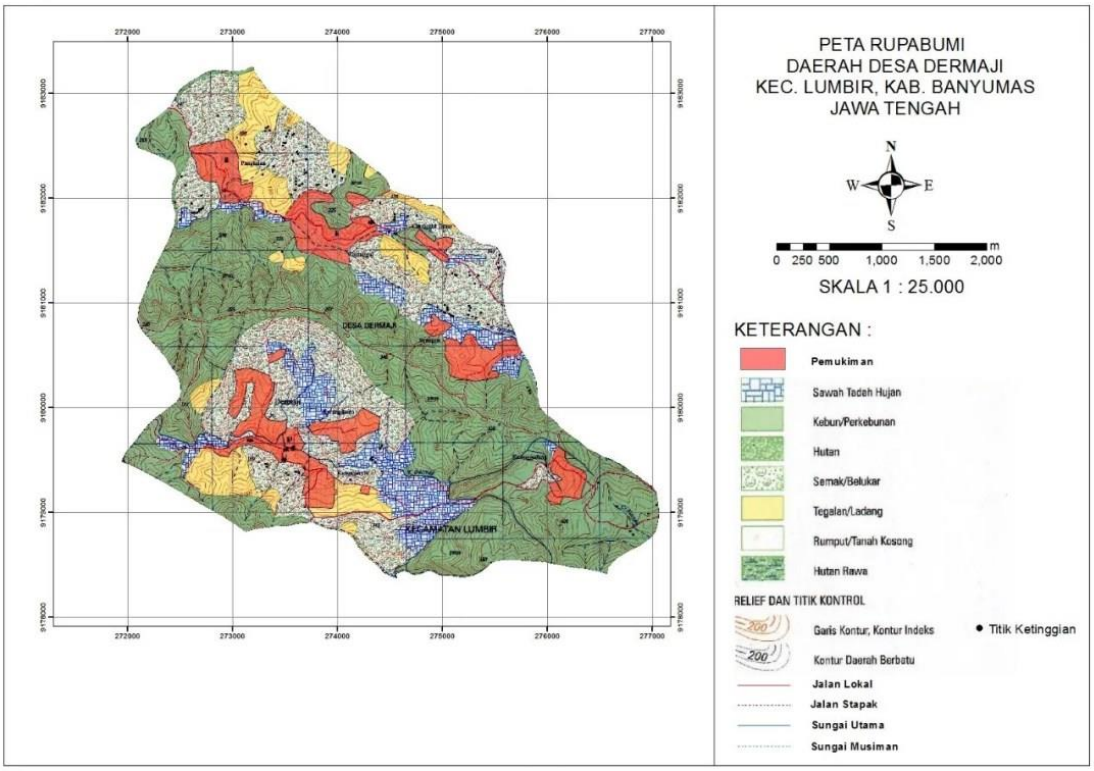

Gambar 1. Wilayah Desa Dermaji
(Sumber : https://www.dermaji.desa.id/)

Desa Dermaji sangat vital bagi Kecamatan Lumbir yang terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas. Jarak antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah adalah 5 km dan titik pusat administrasi Kabupaten Banyumas di tengah adalah 55 km. Sebagian besar wilayah Desa Dermaji merupakan wilayah yang miring dan bergelombang dengan ketinggian 100-300 meter di atas permukaan laut. Curah hujan biasa adalah 1.500 mm hingga 2.500 mm secara konsisten. Luas Desa Dermaji adalah 1.320 ha, yang terdiri dari persawahan 96 ha, tanah milik 31 ha, sawah/kebun 649 ha, lahan 500 ha, dan lain-lain 26 ha (Demaji Village, 2021).

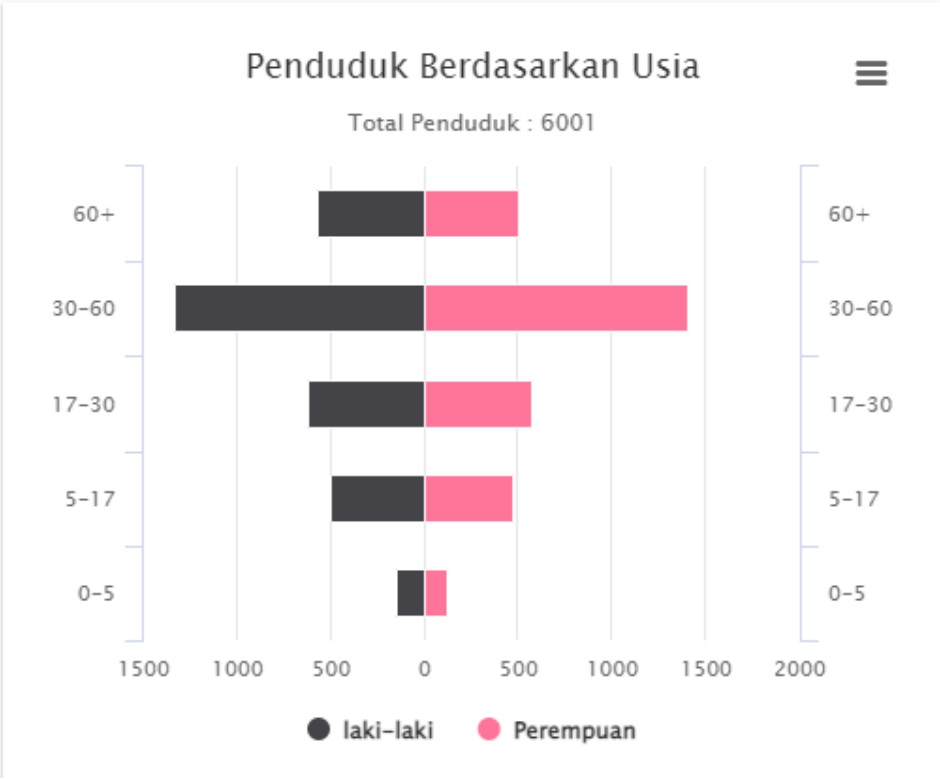

Gambar 2. Grafik Piramida Penduduk Desa Dermaji
(Sumber : https://www.dermaji.desa.id/)

Jumlah penduduk Desa Dermaji pada tahun 2021 sebanyak 6.001 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 3.040 jiwa dan jumlah perempuan 2.961 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.088 KK. Secara umum, kualitas pembelajaran individu Desa Dermaji terdiri dari lulusan SD, SMP, SMA, Rekognisi, Lone Ranger dan Sarjana. Beberapa di antaranya masih ditemukan oleh individu yang belum tamat sekolah. Kemudian untuk profil pekerjaan individu Desa Dermaji sebagian besar adalah peternak. Sisanya mengisi sebagai pekerja, visioner bisnis, pekerja harian, instruktur, pedagang, pegawai pemerintah dan pengemudi. Ada juga orang-orang tertentu yang tidak bekerja (Desa Dermaji, 2021).

Dalam mencapai tujuannya, metodologi perbaikan Desa Dermaji ditujukan pada upaya untuk mempercepat interaksi kemajuan di segala bidang dengan menggunakan semua potensi yang ada, baik kemampuan SDM, aset normal, aset moneter, termasuk media elektronik.

Pada aspek kemudahan akses, publik dapat mengakses informasi dengan mudah mengenai perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Dermaji. Upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Dermaji dapat dikatakan aktif dalam memberikan informasi penanganan pandemi Covid-19 baik himbauan protokol kesehatan maupun ajakan kepada warga untuk tetap mematuhi arahan yang diintruksikan pemerintah pusat, sehingga informasi tersebut dapat mudah diakses oleh publik.

Beberapa upaya kemudahan akses dari adanya himbauan dapat terlihat pada laman resmi Desa Dermaji (dermaji.desa.id) dimana beberapa himbauan tersebut seperti: masyarakat agar melakukan pencegahan dengan cara membudayakan perilaku hidup bersih sehat, termasuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, setiap akan dan selesai melakukan berbagai aktivitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Dermaji dalam penanganan pandemi Covid-19 yakni dengan penyemprotan disinfektan di berbagai fasilitas umum seperti: sekolah, masjid, balai pertemuan, pondok pesantren, serta beberapa ruang publik yang sering dijadikan tempat berkumpul warga. Terdapat 23 orang yang tergabung sebagai satgas dalam kegiatan penyemprotan, yang berasal dari unsur perangkat desa, bhabinkamtibmas, babinsa, linmas, bidan desa, dan Pokdar Kamtibmas.

Kemudahan akses sebagai komponen utama dalam transparansi yang dijalankan Pemerintah Desa Dermaji dalam penanganan pandemi Covid-19 sejalan dengan Dwiyanto (2021) mengklarifikasi bahwa keterusterangan dalam pemerintahan dapat dicirikan sebagai kapasitas untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dalam asosiasi di area publik melalui pertemuan terbuka, mengizinkan masuknya catatan, mendistribusikan data melalui situs secara efektif, melindungi informan dan secara mengejutkan melalui kebocoran data yang melanggar hukum. Terlebih dalam akuntabilitas publik, administrasi atau asosiasi harus memiliki pilihan untuk mengklarifikasi setiap kegiatan yang diambil. Keterusterangan menyiratkan akses terbuka untuk semua individu yang diinvestasikan ke data apa pun dan sebagai instrumen untuk mensurvei eksekusi otoritatif (Koppell, 2005). Sehingga keterbukaan akses sebagai kemudahan publik dalam menjangkau informasi yang ada di Desa Dermaji dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai wujud komitmen pemerintah desa secara transparan dapat dikatakan baik, namun ada beberapa catatan sebagai rekomendasi kedepannya, bahwa dengan keterbukaan akses tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Dermaji yang disebabkan oleh sulitnya jaringan internet dan terbatasnya kapasitas SDM.

Pada aspek media informasi, publik dapat secara langsung melihat perkembangan informasi yang ada di Desa Dermaji melalui laman resmi Desa Dermaji (dermaji.desa.id) maupun di media sosial. Manfaat media sosial ini mendorong Pemerintah Desa Dermaji untuk berupaya transparan terhadap kepercayaan publik dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Sehingga Desa Dermaji dijuluki desa melek IT karena perkembangan media elektronik yang sangat pesat dimanfaatkan untuk memberikan informasi disetiap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa Dermaji. Isu yang muncul dari berbagai capaian Desa Dermaji sebenarnya muncul dari perkembangan pemanfaatan inovasi terkomputerisasi yang terbebani oleh tugas walikota. Lagi pula, pemerintah kota dan individu Desa Dermaji belum sepenuhnya menjadi penghibur. Terlepas dari kenyataan bahwa aplikasi kota canggih yang telah dilakukan benar-benar membutuhkan otoritas kota dan jaringan kota sebagai klien dasar (Rokhman, Ali & Bahtaruddin, 2019). Pentingnya aset dalam mendukung pelaksanaan pengaturan keterusterangan publik harus didukung oleh SDM dan data yang memadai, subsidi, otoritas, dan kantor pendukung lainnya (Afandi dan Warjio, 2015). Sehingga

jelas faktor SDM sangat berpengaruh pada tersedianya media informasi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Dermaji. Sehingga hal ini perlu didorong supaya transparansi publik berjalan dengan baik dengan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dan penguatan jaringan internet yang menjangkau keseluruh wilayah Desa Dermaji. Karena transparansi menjadi salah satu prinsip dalam mewujudkan *good governance* (Fatullatifah, Ngabiyanto, & Munandar, 2017).

IV. KESIMPULAN

Transparansi publik dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan wujud respon pemerintah Desa Dermaji sebagai wadah akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukannya. Transparansi ini dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses dan media informasi. Sejauh ini kemudahan akses dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Dermaji berjalan dengan baik sehingga publik bisa seluas-luasnya mengakses laman resmi Desa Dermaji (dermaji.desa.id) mengenai perkembangan informasi terkini. Media informasi yang dipakai dalam konteks transparansi publik ini dengan memanfaatkan media elektronik berupa laman resmi desa dan media sosial. Namun perlu diperhatikan dalam pelaksanan transparansi publik ini di Desa Dermaji dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu adanya peningkatan kapabiliitas aparatur desa dalam pengelolaan teknologi digital informasi desa, serta penguatan jaringan internet supaya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di Desa Dermaji.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. I., & Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik,* 6(2), 92-113. Retrieved from http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70.

Coryanata, I. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2)*, 110-125. Retrieved from http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830.

Desa Dermaji. (2021). *Statistik.* Diunduh dari https://www.dermaji.desa.id/ pada tanggal 10 November 2021.

Dwiyanto, Agus. 2021. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Fatullatifah, Menik, Ngabiyanto, & Moh Aris Munandar. 2017. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Pemerinah Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*. Vol. 1, No. 2. P 160-174.

Islamy, I. 2016. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Cetakan ke-16). Jakarta: Bumi Aksara.

J. Twigg. 2009. *Characteristics of a Disaster-Resilient Community*. London: University College London.

Koppell, J. G. 2005. Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of "multiple accountabilities disorder". *Public Administration Review*, Vol 65, No 1: 94-108.

Kristiyanto, Eko, N. 2016. Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 231 – 244.

Laman Pemerintah Desa Dermaji (dermaji.desa.id). Diakses 12 Juli 2020.

Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset

Mas'udi, Wawan dan Winanti, Poppy. 2020. *Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Tata Kelola.*

Pülzl, H., & Treib, O. 2007. *Implementing Public Policy.* In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89-107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

Rahayu, A. Y. S. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*.

Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. 2014. Writing a Literature Review Research Paper : A step-by-step approach. *International Journal of Basics and Applied Sciences,* 03(01), 47–56. https://doi.org/10.1177/0021886391273004.

Rohman, A. T. 2016. *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved from http://repository.unpas.ac.id/1661/.

Rokhman, Ali & Bahtaruddin. 2019. Model Keberlanjutan Desa Digital Berbasis Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*. "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX" 19-20 November 2019: Purwokerto.

Snyder, H. 2019. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). (2020). *Situation Report* – 70 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330- sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2.

World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Novel Coronavirus (2019-nCoV) *Situation Report - 54* [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 15; cited 2020 March 30]. Available from: https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314- sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2.

World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Situation Report – 10* [Internet]. 2020 [updated 2020 January 30; cited 2020 March 15]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov. pdf?sfvrsn=d0b2e480_2.